



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 84 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG PERIODE  
TAHUN 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 225/SDM.13.3-BA/2104/2023 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi Dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Periode 2023-2028 tanggal 1 Juli 2023, telah ditetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Periode 2023-2028;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Periode 2023-2028;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 739 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih pada 44 (Empat Puluh Empat) Kabupaten/Kota di 5 (Lima) Provinsi Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
  - b. Protokol dan persidangan;
  - c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
  - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
  - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kota Tanjungpinang; dan

- f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
    - a. Sosialisasi kepemiluan;
    - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
    - c. Publikasi dan kehumasan;
    - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
    - e. Kerja sama antar lembaga;
    - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
    - g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
    - h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
    - i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
    - j. Pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia;
    - k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
    - l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
  3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
    - a. Menjabarkan program dan anggaran;
    - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
    - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
    - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
    - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
    - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
    - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
  - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
  - d. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
  - e. Pelaporan dana kampanye; dan
  - f. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Tanjungpinang.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan keijakan:
  - a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Tanjungpinang;
  - b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
  - c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
  - d. Pengawasan dan pengendalian internal;
  - e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
  - f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
6. Membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

KETIGA : Kooordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk:

1. melakukan Koordinasi;
2. melakukan Supervisi;
3. melakukan pembinaan; dan/atau
4. mempercepat penyelesaian permasalahan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 1 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Bobby Tinambunan

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TANJUNGPINANG  
 NOMOR 84 TAHUN 2023  
 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB  
 DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2023-2028

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2023-2028

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	MUHAMMAD FAIZAL	KETUA	KEUANGAN, UMUM, RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK
	ANDRI YUDI	WAKIL KETUA	
2.	NOVIRA DAMAYANTI	KETUA	SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	DESI LIZA PURBA	WAKIL KETUA	
3.	DESI LIZA PURBA	KETUA	PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
	HJ. SUSANTY	WAKIL KETUA	
4.	ANDRI YUDI	KETUA	TEKNIS PENYELENGGARAAN
	NOVIRA DAMAYANTI	WAKIL KETUA	
5.	HJ. SUSANTY	KETUA	HUKUM DAN PENGAWASAN
	MUHAMMAD FAIZAL	WAKIL KETUA	

Ditetapkan di Tanjungpinang  
 pada tanggal 1 Juli 2023

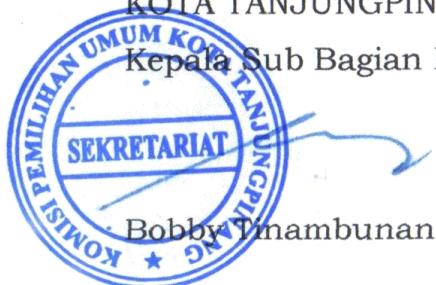
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  
 MUHAMMAD FAIZAL



Bobby Dinambunan

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 84 TAHUN 2023  
TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB  
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2023-2028

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2023-2028

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
1.	HJ. SUSANTY	TANJUNGPINANG KOTA
2.	NOVIRA DAMAYANTI	TANJUNGPINANG TIMUR
3.	ANDRI YUDI	TANJUNGPINANG BARAT
4.	DESI LIZA PURBA	BUKIT BESTARI

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 1 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,

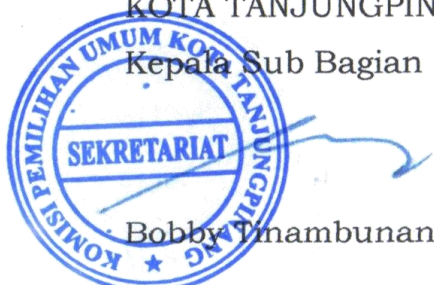
ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Bobby Timambunan